



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

		(Ribu Rupiah)
	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	868.019.050.028
1	Pembiayaan Utang	973.583.008.108
1.1	Surat Berharga Negara (Neto)	991.288.955.628
1.2	Pinjaman (Neto)	(17.705.947.520)
1.2.1	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.753.633.803
1.2.1.1	Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	3.581.793.803
1.2.1.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.828.160.000)
1.2.2	Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(19.459.581.323)
1.2.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	63.543.958.677
1.2.2.1.1	Pinjaman Tunai	28.700.000.000
1.2.2.1.2	Pinjaman Kegiatan	34.843.958.677
1.2.2.1.2.1	Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	31.265.858.978
1.2.2.1.2.1.1	Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga	28.118.454.856
1.2.2.1.2.1.2	Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	3.147.404.122

1.2.2.1.2.2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1.2.2.1.2.2	Pinjaman Kegiatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	3.578.099.699
1.2.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(83.003.540.000)
2	Pembiayaan Investasi	(182.318.568.032)
2.1	Investasi Klaster Infrastruktur	(86.419.000.000)
2.2	Investasi Klaster Pendidikan	(20.000.000.000)
2.3	Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	(3.000.000.000)
2.4	Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(1.941.989.242)
2.5	Cadangan Pembiayaan Investasi	(21.480.000.000)
2.6	Pembiayaan Pendidikan	(49.477.578.790)
3	Pemberian Pinjaman	585.472.952
3.1	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)	585.472.952
3.1.1	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	(3.578.099.699)
3.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	4.163.572.651
4	Kewajiban Penjaminan	(1.130.863.000)
4.1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(316.863.000)
4.1.1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(5.786.000)
4.1.2	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(158.470.000)

4.1.3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4.1.3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(7.664.000)
4.1.4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(141.882.000)
4.1.5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(3.061.000)
4.2	Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	(814.000.000)
4.2.1	Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN	(814.000.000)
4.2.1.1	Penjaminan <i>loss limit</i> UMKM	(814.000.000)
5	Pembiayaan Lainnya	77.300.000.000
5.1	Saldo Anggaran Lebih	77.300.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yudia Silvanna Djaman

SK No 117639 A